

**JAPAN PLATFORM DAN UPAYA PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT SIGI PASCA
BENCANA DI SULAWESI TENGAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh

NURLINA

4515023012

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**JAPAN PLATFORM DAN UPAYA PEMULIHAN EKONOMI PEREMPUAN PASCA
BENCANA DI SIGI SULAWESI TENGAH**

Nur Lina

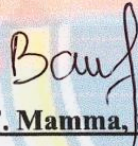
4515023012

Skripsi telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi
pada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa

Makassar, 9 Maret 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Beche BT. Mamma, S.IP., M.A.



Zulkhair Burhan, S.IP., M.A.

Mengetahui,

Dekan FISIP Universitas Bosowa

Ketua Prodi HI Universitas Bosowa




Arief Wicaksono, S.IP., M.A.



Zulkhair Burhan, S.IP., M.A.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena berkat kemudahan yang Allah berikan penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi yang di tujukan untuk memenuhi syarat dalam mendapat gelar sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, dengan judul Japan Platform dan Upaya Pemulihan Ekonomi Masyarakat Sigi Pasca Bencana di Sulawesi Tengah.

International Non-Government Organizations (INGOs) merupakan aktor penting yang paling berpengaruh dalam distribusi bantuan luar negeri. INGO telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam hal kuantitas, sebelum dan sesudah Perang Dingin. Edward (2000:9, dalam Suharko 2003:2) mencatat bahwa pada tahun 1909, jumlah INGO di dunia ini hanya sekitar 176 organisasi. Setelah Perang Dingin berakhir, jumlah INGO meningkat menjadi sekitar 28.000 pada tahun 1993.

Makassar, Oktober 2020

Nurlina

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahill'abidin, segala puji bagi Allah Subhaanahu Wa Ta'ala karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat melaksanakan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulis dengan tulus ingin menyampaikan dan mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh pallu, M.Eng** selaku rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak **Arief Wicaksono, S.IP., M.A.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa beserta jajarannya.
3. Bapak **Zulhair Burhan, S.IP., M.A.** selaku Ketua Prodi Hubungan Internasional Universitas Bosowa.
4. Ibu **Beche BT. Mamma, S.IP., M.A.** sebagai pembimbing I dan Bapak **Zulhair Burhan, S.IP., M.A.** sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam menuntun, membimbing, mendukung, memberikan arahan, pengalaman, masukan maupun saran yang sangat membantu dan bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen Hubungan Internasional Universitas Bosowa Bapak **Asyari Mukrim, S.IP., MA, Fivi Elvira Basri, S.IP., MA, M.A, Rosnani S.IP., MA, Finahliyah Hasan, S.IP., MA,** serta Dosen Fisip yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah mengayomi dan memberikan dukungan serta memberikan informasi dan motivasi dalam kegiatan pembelajaran maupun sifatnya non akademis selama dalam proses menuntut ilmu di Universitas Bosowa Makassar.

6. Terimakasih kepada Bapak Budi dan Ibu Hj Megawati Hasan selaku staf tata usaha yang telah banyak membantu dalam menangani masalah administrasi di kampus selama dalam menempuh perkuliahan.



ABSTRAKSI

Nurlina, Japan Platform dan upaya pemulihan ekonomi masyarakat Sigi pasca bencana di Sulawesi Tengah. Dibawah bimbingan, Pembimbing I Beche Bt. Mamma,S.Ip.,M.A dan pembimbing II Zhulkhair Burhan, S.Ip, M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan atau upaya salah satu Non Governmental Organization yang berasal dari Jepang dalam membantu pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah tahun 2018 yang di mobilisasi oleh ibu-ibu penyintas kemiskinan.

Japan Platform didirikan di Jepang pada tahun 2000. Pada awalnya fokus utama Japan Platform hanya pada pendidikan anak-anak yang terdampak konflik atau bencana alam yang terjadi di suatu negara, kemudian pada saat melihat kasus kelaparan yang terjadi pada masyarakat Jepang, Japan Platform tidak lagi hanya berfokus pada pendidikan anak-anak akan tetapi berkembang menjadi organisasi yang berfokus pada isu kemanusiaan. Japan Platform merupakan salah satu aktor penting dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan di Sulawesi Tengah yang tidak hanya membantu pada saat proses tanggap darurat bencana akan tetapi berlanjut pada tahap memberi bantuan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah perekonomian yang di mobilisasi oleh perempuan.

Kata kunci : Japan Platform, KPKP-ST, Humanitarian Assistance

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PENERIMAAN	
KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMAKASIH	ii
ABSTRAKSI	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Dan Rumusan Masalah.....	3
a. Batasan Masalah.....	3
b. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan & Kegunaan Penelitian.....	4
a. Tujuan Penelitian.....	10
b. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian	15
1. Tipe Penelitian.....	15
2. Jenis dan Sumber Data.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik analisa Data.....	16
F. Rancangan sistematis Pembahasan.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Non Governmental Organization.....	18
B. Bantuan kemanusiaan (Humanitarian Assistance)	23
C. Konstruktivisme	26

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah singkat Japan Platform.....	30
B. Strategi pendanaan Japan Platform.....	32
C. Dampak dan kerugian bencana SulTeng	33

BAB IV PEMBAHASAN

A. Upaya Japan Platform dalam pemulihan ekonomi	48
B. Pelaksanaan proyek Assisting economic empowerment	53
C. Dampak kerjasama JPF dan KPKP-ST	60
D. Faktor-faktor Assisting economic empowerment.....	63

BAB V PENUTUP

Kesimpulan	64
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	65
---------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam perkembangannya ilmu hubungan internasional, isu bencana menjadi salah satu isu yang relevan sebagai sebuah kajian. Isu bencana dapat dilihat sebagai isu keamanan non tradisional dalam hubungan internasional. Jika sebelumnya bencana di pandang hanya sebagai sebuah ancaman, resiko, kerentanan serta dapat di kontrol dan di mitigasikan. Lebih lanjut bencana merupakan isu sosial yang berkaitan dengan resiko yang di hadapi masyarakat. Resiko suatu masyarakat terhadap bencana merupakan kombinasi antara bahaya dan kerentanan terhadap kemampuan masyarakat yang terkena dampak bencana.

Bencana alam dalam skala besar telah melibatkan banyak aktor, tidak hanya peran negara yang menjadi sorotann namun aktor seperti organisasi-organisasi internasional, organisasi non pemerintah dan media massa yang memiliki ruang sendiri. Relasi antara aktor tersebut dalam isu bencana dapat dijelaskan sebagai hubungan antara negara penerima donor dan lembaga pendonor. Fenomena ini memperlihatkan menguatnya solidaritas transnasional dalam merespon trjadinya bencana. Masalah ini tidak lagi menjadi persoalan lokal semata, namun telah menjadi masalah global yang melewati lintas batas negara. Misalnya bencana alam yang terjadi di daerah Palu,Sigi dan Donggala Sulawesi Tengah, pada tanggal 28 September 2018 karena adanya patahan palu

koro yang melintas yang menyebabkan pergeseran sekitar 10 km dibawah permukaan tanah sehingga terjadi gempa berkekuatan 10,1 skala richter serta tsunami dan likuifaksi yang telah mengorbankan kurang lebih 177,401 jiwa dari keseluruhan korban yang terdampak di tiga wilayah di Sulawesi Tengah dengan total kerugian sebanyak Rp 13,53 triliun yang merupakan kerugian dari aspek materil, fisik, kerugian sosial, dan sebagainya, baik yang terhitung maupun tidak terhitung. (BNPB, 2018).

Menurut Willem mengutip data dari bappenas, sebelum terjadi gempa di Sulawesi Tengah khususnya di wilayah Sigi pertumbuhan ekonomi mencapai 6,24 persen. Kondisi setelah terjadi gempa, tsunami dan likuifaksi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut menjadi 1,75 persen. Hal ini di akibatkan salah satunya karna gagal panen, hilangnya aset produksi dan terputusnya lapangan pekerjaan sehingga mengakibatkan terganggunya kehidupan sehari-hari masyarakat pasca terjadinya bencana yang secara langsung berdampak terhadap semakin meningkatnya masyarakat miskin.

Pasca bencana yang terjadi di tiga wilayah di Sulawesi Tengah, berbagai bantuan datang dari berbagai kalangan, baik pemerintah, masyarakat biasa , organisasi pemerintah, Organisasi Non Pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri bergerak untuk memberikan bantuan dalam jumlah yang besar. Salah satu organisasi yang ikut serta dalam memberikan bantuan yaitu Japan Platform yang merupakan organisasi yang berfokus terhadap isu kemanusiaan menjalin kerjasama dengan LSM lokal yaitu Kelompok Perjuangan dan

Kesetaran Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST) dalam memberikan bantuan terhadap korban terdampak bencana.

Selain bantuan cepat tanggap pasca bencana, Japan Platform juga membentuk program Assisting Women's Economic Empowerment for Earthquake and Tsunami Recovery in Central Sulawesi dengan organisasi lokal yaitu KPKP-ST untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan akibat bencana yang terjadi Sulawesi Tengah dengan memberikan bantuan finansial sebesar 200 miliar. Selain memberikan bantuan dana japan Platform yang merupakan organisasi operasional melakukan beberapa upaya untuk membantu masyarakat dalam pemulihan ekonomi sehingga dapat membantu pemerintah dalam menekan masalah yang timbul yang di akibatkan oleh lumpuhnya ekonomi pasca bencana. Maka dari itu penulis ingin mengetahui upaya Japan Platform (JPF) dalam pemulihan ekonomi masyarakat Sigi pasca bencana di Sulawesi Tengah tahun 2018?.

B.Batasan Dan RumusanMasalah

1. Batasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup masalah yang cukup luas maka penulis hanya akan mengambil peranan Non Government Organization Jepang dalam membantu korban terdampak bencana di Sigi, Sulawesi Tengah tahun 2018.

Hal ini bertujuan untuk memfokuskan pada peranan Japan Platform dalam pemulihan ekonomi perempuan pasca bencana alam di Sulawesi tengah.

2. Rumusan Masalah

Apa upaya Japan Platform (JPF) dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana 2018 di Sigi Sulawesi Tengah?

C. Tujuan & Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak keberhasilan Japan Platform dalam pemulihan ekonomi perempuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan meminimalisir timbulnya masalah baru pada kaum perempuan pasca bencana.

2. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Mengidentifikasi peran Japan Platform dalam pemberdayaan pemullihan ekonomi perempuan pasca bencana di Kabupaten Sigi.
- b. Menambah pembendaharaan referensi di Perpustakaan Perpustakaan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Bosowa Makassar.

D.Kerangka Konseptual

1. Non Governmental Organization

Terdapat satu fokus utama yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya Organisasi Non Pemerintah yang berasal dari Jepang dalam melakukan pemulihan ekonomi pasca bencana. Pemulihan ekonomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan ekonomi dalam pola konjungtur yang ditandai oleh mulai meningkatnya kembali produksi dan konsumsi, penambahan kesempatan kerja, jumlah uang beredar dan peningkatan permintaan kredit. Peranan menurut K.J Holsti yang diterjemahkan Wawan Juanda dalam bukunya “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis” yaitu:

“Konsep peranan bisa dianggap sebagai definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan, dan fungsi Negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional. Peranan juga merefleksikan kecenderungan pokok, kekhawatiran, serta sikap terhadap lingkungan eksternal dan variable sistematik geografi dan ekonomi” (1992:159)

Peranan Organisasi Non Pemerintah sendiri menurut Noelen Heyzer yaitu Kehadiran NGO dalam sebuah masyarakat merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak. Hal itu terjadi karena bagaimanapun juga, kapasitas pemerintah terbatas. Tidak semua kebutuhan warga masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah, apalagi di negara-negara yang sedang membangun seperti

Indonesia. Karena keterbatasan itu, pemerintah tidak jarang mengambil langkah tertentu untuk melakukan penghematan (Noeleen, V. Ryker, & B. Quizon, 1995). Melihat keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah, bukan suatu hal yang aneh jika NGO hadir sebagai agen penyedia terbaik karena sebagian besar agenda dan kegiatan pelayanan mereka lebih efisien dan efektif dari pada kegiatan ataupun kebijakan yang disediakan oleh pemerintah, dimana pemerintah terkadang tidak efektif dan efisien dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. (Noeleen, V. Ryker, & B. Quizon, 1995).

David Lewis dan Nazneen Kanji mendefinisikan bahwa NGO (Non Government Organization) sebagai solusi baru dalam pemecah permasalahan pemerintah, Non-Governmental Organization juga merupakan pelaku utama sektor ketiga dalam lanskap pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan dan area lainnya dalam aksi publik dimana sebuah Non Governmental Organizatio dapat didefinisikan sebagai sebuah “voluntary associations” yang memiliki kepedulian untuk merubah sebuah lingkungan tertentu dalam konteks yang lebih baik (Lewis & Kanzi, 2009). David Lewis dan Nazneen Kanji dalam bukunya yang berjudul “Non-Governmental Organization and Development” mengklasifikasikan peran Non Governmental Organization menjadi 3 hal yaitu Service Delivery atau Implementer, Catalysis, dan Partnership . Sebuah NGO bisa hanya melakukan salah satu perannya saja, tetapi bisa juga melakukan ketiga perannya sekaligus (Lewis & Kanzi, 2009) .

Peran Service Delivery atau Implementer didefinisikan sebagai mobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa sebagai bagian dari proyek atau program Non Governmental Organization itu sendiri atau pemerintah maupun lembaga donor lainnya. Peran Service Delivery atau Implementer ini banyak dilakukan oleh NGO melalui program-program atau proyek-proyek yang dibentuk oleh NGO untuk menyediakan bantuan berupa pelayanan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan (seperti perawatan kesehatan, pinjaman maupun bantuan dalam bidang ekonomi lainnya, penyuluhan pertanian, nasihat hukum atau bantuan darurat). Pelayanan bisa dilakukan ataupun diberikan secara langsung kepada masyarakat di mana ketika tidak ada layanan yang disediakan atau di mana layanan yang telah disediakan tidak memadai, banyak NGO yang berperan sebagai Implementer atau Service Delivery ini memilih untuk bekerja bersama dengan pemerintah untuk memperkuat penyediaan layanan secara keseluruhan. Terkadang bentuk dari pelayanan ini juga diberikan melalui pelatihan-pelatihan baik kepada NGO, pemerintah maupun sektor privat, melalui penelitian serta pemberian input spesialis mengenai pelatihan suatu isu seperti perekonomian. Dilema dalam peran Service Delivery adalah apakah Service Delivery yang dilakukan oleh NGO untuk menjembatani celah yang ada sampai pemerintah mampu mengatasinya sendiri atau NGO sebagai sektor privat melakukan Service Delivery melalui kontrak dengan pemerintah (Lewis & Kanzi, 2009).

Peran Catalyst dapat diartikan sebagai kemampuan NGO untuk menginspirasi dan mengubah kerangka berpikir aktor lain. Dapat diartikan bahwa NGO menjadi agen yang mampu menimbulkan perubahan, baik melalui advokasi maupun inovasi untuk menemukan solusi baru mengenai suatu isu. Peran ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu advokasi, inovasi, serta melalui watchdog. Advokasi tersebut juga kemudian dapat berkaitan dengan partnership dimana NGO dapat melakukan kerjasama langsung dengan pemerintah untuk mengubah paradigma mereka. Advokasi juga merupakan strategi NGO untuk meningkatkan efektivitas dan dampak dari kerjanya di sebuah negara. Sebuah NGO dalam melakukan advokasi dapat menjadi aktor "Policy Entrepreneur". Untuk menjadi Policy Entrepreneur, ada tiga tahapan yang dilalui yaitu Agenda Setting, Policy Development dan Policy Implementation. Agenda Setting adalah persetujuan yang dilakukan atas isu dan prioritas yang akan dilakukan, Policy Development merupakan penyusunan pilihan-pilihan kebijakan dari kemungkinan alternatif yang ada dan Policy Implementation adalah bentuk tindakan yang merupakan hasil dari kebijakan yang dipilih. Sedangkan kemampuan untuk melakukan inovasi sering diklaim sebagai kualitas khusus atau bahkan sebagai bidang keunggulan komparatif. Inovasi yang dilakukan LSM dapat mempermudah masyarakat keluar dari masalah mereka, dari inovasi yang telah ditemukan oleh NGO tersebut, NGO tersebut kemudian mulai bekerja untuk melobi pemerintah dan melatih pemerintah untuk menggunakan serta mengamankan penggunaan dari

inovasi baru oleh para pekerja pemerintah di wilayah lainnya untuk memperluas manfaat dari inovasi tersebut. Peran sebagai Catalys juga dapat dilakukan melalui Watchdog dimana NGO bertindak melakukan pengawasan bagi suatu kebijakan pemerintah tertentu agar tetap diimplementasikan (Lewis & Kanzi, 2009).

Peran Partnership dilakukan NGO melalui kerjasama dengan aktor lain baik pemerintah, donatur ataupun sektor privat dimana kedua belah pihak berbagi keuntungan ataupun risiko dari kerjasama yang terjalin tersebut. Kerjasama yang terjalin antara NGO dengan pemerintah dapat membantu pemerintah untuk menangani suatu permasalahan tertentu dimana terkadang program ataupun kebijakan pemerintah tersebut tidak berjalan dengan baik. Bentuk Partnership juga dapat dilihat pada kerjasama antara NGO dengan aktor lain baik individu maupun NGO berupa pembentukan program Capacity Building untuk meningkatkan dan memperkuat kapabilitas NGO ataupun masyarakat yang menjadi sasarannya (Lewis & Kanzi, 2009).

Berdasarkan konsep peranan NGO menurut David Lewis dan Nazneen Kanji Japan Platform sebagai salah satu NGO berskala Internasional menunjukkan peran yang cukup besar dalam memberikan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Sigi, dalam hal ini Japan Platform menunjukkan perannya sebagai Service Delivery dan Catalys. Setelah pemberian bantuan yang dilakukan oleh Japan Platform, Japan Platform kembali membantu korban terdampak bencana dalam hal pemulihan ekonomi. Service Delivery

yang dilakukan oleh Japan Platform yaitu dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan korban terdampak bencana seperti pendidikan, dan kesehatan dan pelayanan lainnya. Service Delivery yang diberikan kepada korban terdampak bencana juga melibatkan LSM daerah setempat yaitu KPKP-ST untuk mempermudah NGO tersebut dalam memberikan pelayanan langsung kepada korban bencana.

Selain memberikan bantuan langsung kepada korban terdampak bencana Japan Platform juga berperan sebagai Catalys, dimana dalam hal ini Japan Platform menjadi agen yang mampu menimbulkan perubahan, melalui inovasi untuk menemukan solusi baru dalam pemulihan ekonomi korban terdampak bencana dengan memberikan pelayanan sosial dan pelatihan keterampilan ekonomi.

2. Humanitarian Assistance

Bantuan kemanusiaan menjadi simbol nasionalisme baru antar bangsabangsa di dunia. Nasionalisme untuk membangun tata dunia dan transnasional yang lebih makmur dan peka terhadap penderitaan sesama. Nilai-nilai universal yang dipegang oleh banyak bangsa di dunia lahir kembali untuk batas-batas antar manusia satu dengan manusia lainnya.

Humanitarian Assistance merupakan suatu aksi bantuan (Humanitarian Aid) maupun nyata (Humanitarian Action) yang dibuat untuk menyelamatkan hidup orng banyak, menyelesaikan, meringankan penderitaan seta memelihara

dan melindungi hidup orang banyak selama maupun sesudah terjadinya suatu permasalahan seperti konflik atau bencana alam di suatu negara. Bantuan dapat diberikan dari semua pihak baik pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, para sukarelawan, masyarakat sipil maupun dan pendonor. Dalam kasus ini sebagai organisasi non pemerintah Japan Platform yang memberikan bantuan terhadap korban terdampak bencana di Sulawesi Tengah

Terdapat tiga prinsip utama dalam melakukan bantuan kemanusiaan menurut konsep Humanitarian Assistance yaitu:

1. Humanitarian

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap manusia yang mengalami penderitaan harus di berikan bantuan dimanapun mereka berada sebagai tujuan dari aksi kemanusiaan yang memiliki landasan untuk melindungi kehidupan dan menjamin rasa saling menghargai antara manusia. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk apapun terhadap manusia yang berada dalam situasi konflik, bencana alam, atau berada dalam keadaan darurat. Pihak yang terlibat dalam konflik harus menghargai atau menghormati keberadaan bantuan tersebut terhadap para korban.

2. Impartial

Prinsip ini menyatakan dengan tegasnya pentingnya kesetaraan dalam pemberian bantuan dari segi hak maupun kewajiban. Terdapat tiga elemen dasar untuk memperjelas pernyataan prinsip ini antara lain:

a. Non Diskrimination

Tidak diperkenankan adanya diskriminasi dalam pemberian bantuan. Pihak yang memberikan bantuan tidak boleh memihak kepada yang diberikan bantuan manapun. Serta memicu agresi di bidang politik, gender, rasial, ekonomi, maupun ideologi-ideologi.

b. Proportionality

Bantuan yang di berikan harus bersifat proporsional yaitu, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para korban terkait situasi yang dihadapi

c. No Subjektive Distinction

Bantuan yang diberikan tidak diperkenan bersifat membedakan berdasarkan latar belakang atau status hukum seseorang.

3. Neutrality

Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang memberikan bantuan harus bersifat netral, yang berarti tidak berpartisipasi dalam konflik bersenjata secara langsung maupun tidak langsung. Bantuan yang

ditujukan harus langsung kepada masyarakat sipil menjadi korban bukan kepada anggota militan atau yang terlibat konflik.

3. Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan sebuah sudut pandang baru dalam ilmu hubungan internasional yang mempertanyakan metode ilmiah realisme dan liberalisme. Teori ini pertama kali di tulis oleh Onuf namun di telaah lebih secara mendalam oleh Alexander Wendt. Dalam teori ini Wendt mencoba mengembangkan jalur pemikiran tengah antara rasionalis dan reflektif. Selain itu Wendt juga mencoba menelaah teori ini dari sudut pandang epistemologi positivis dan ontologi positivis. Konstruktivisme Wendt berargumen bahwa sistem internasional adalah hasil dari konstruksi yang pada akhirnya memiliki nilai sosial, norma, dan asumsi sesuai dengan yang imbuhi. (Alexander Wendt,1992)

Struktur merupakan salah satu pembahasan yang cukup penting bagi konstruktivisme yang membedakan dirinya dengan perspektif rasionalis. Para rasionalis memandang struktur adalah kumpulan kompetisi dan distribusi kapitalis. Strukturlah lah yang mendesak perilaku para aktor di dalamnya. Oleh karna itu, tindakan paling rasional bagi para aktornya ialah memaksimalkan kepentingannya. Melihat tersebut, dapat disimpulkan tindakan para aktor dalam asumsi rasionalis didasarkan pada *logic of consequences*. (Finnemore & Sikkink,1998)

Berbeda dengan pandangan rasionalis, konstruktivisme berfokus pada norma dan pengertian suatu aksi. Struktur tidak hanya mendesak perbuatan aktor, namun struktur merupakan identitas dari aktor itu sendiri. Apa yang rasional tergantung dari apa yang sah (*legitimate*). Apa yang sah tergantung dari norma dan nilai yang berlaku di dalam diri individu atau organisasi tertentu. Di sini, berlaku intersubjektivitas. Oleh karena itu di simpulkan bahwa tindakan para aktor di dasarkan pada *logic of appropriateness*. (Martha Finnemore,1998)

Dalam sebuah kerjasama, konstruktivitas juga berpendapat bahwa organisasi internasional dianalogikan sebagai seorang guru yang bisa mengajarkan nilai-nilai dan ilmu pengetahuan kepada muridnya. Dalam tulisannya yang berjudul *International Organization As a Teacher; United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization and Science Policy*, Martha Finnemore menganalogikan organisasi internasional sebagai guru yang akan mengajarkan nilai-nilai kepada muridnya. Organisasi internasional dipercaya memiliki banyak kesempatan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai negara, kemudian mampu mengkonfigurasi informasi tersebut kedalam bentuk ilmu pengetahuan yang menjadi standar untuk digunakan negara dalam bertindak atau bersikap. Kemampuan mengajarkan ilmu pengetahuan atau cara bersikap inilah yang dimiliki oleh Japan Platform dalam melakukan pemulihan ekonomi kepada masyarakat terdampak bencana khususnya di daerah Sigi, Sulawesi Tengah.

Keberhasilan kerjasama Japan Platform dan KPKP-ST hingga menghasilkan outcomes dilapangan ini sesuai dengan anggapan tokoh konstruktivis yang mengatakan bahwa keberhasilan organisasi internasional dalam mengubah informasi kedalam bentuk pengetahuan dan mengajarkannya ke negara akan mengakibatkan outcomes. Pada akhirnya keberhasilan kerjasama Japan Platform dan KPKP-ST dengan memperlihatkan banyak output dan outcomes membuktikan bahwa yang dikatakan teori konstruktivis mengenai organisasi internasional bukan hanya agen negara melainkan menjadi aktor ataupun pelaku yang kuat dalam sebuah perubahan melalui kerjasama. (Martha Finnemore: 1993) Merujuk pada kesuksesan peran, output dan outcomes dari kerjasama Japan Platform dan KPKP-ST, menunjukkan kesuksesan kerjasama antara organisasi internasional dan institusi Negara dan atau lembaga non pemerintah sebagaimana yang dipercaya Paradigma Konstruktivis.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dimana penulis mencoba untuk menggambarkan dan medeskripsikan analisa terkait peranan dan upaya Organisasi non pemerintah, yaitu Japan Platform dalam pemulihan ekonomi masyarakat Sigi Sulawesi Tengah pasca bencana 2018.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang di dapatkan dari organisasi yang berkaitan dengan Japan Platform dan data sekunder didapat dari studi literatur dan sumber resmi seperti buku, jurnal serta berita terkait dengan pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data primer. Data primer adalah data yang berasal dari pengumpulan data melalui wawancara langsung dan Observasi .

4. Teknik analisa Data

1. Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam peneilitian ini yaitu: wawancara dengan pihak Japang Platform dan KPKPST,
2. observasi lapangan dan data lapangan,
3. telah pustaka (jurnal,artike,dan surat kabar) yang berkaitan dengan kasus pembahasan.

F. Rancangan sistematis Pembahasan

Hasil penelitian dan analisa dalam penelitian ini akan disusun dalam karya tulis ilmiah (skripsi) dengan rancangan sistematika sebagai berikut.

1. Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistimatika pembahasan.
2. Bab kedua, tinjauan pustaka, berisi penulsuran dan litelatur tentang konsep.
3. Bab ketiga, gambaran umum tentang profil Japan Platform dalam peranan pemulihan ekonomi perempuan
4. Bab keempat, yaitu analisis penelitian tentang Japan Platform dalam peranan pemulihan ekonomi pasca bencana alam 2018 di Sigi Sulawesi tengah.
5. Bab kelima, yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Non Governmental Organization

Pada umumnya Non Governmental Organization merupakan sebuah Organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan dari kegiatannya (Praja, 2019). Sedangkan Non Governmental Organization menurut Nugroho merupakan suatu lembaga, kelompok, atau organisasi yang aktif dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan terutama pada lapisan masyarakat bawah. Non Governmental Organization memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Organisasi yang bukan melakukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara
- b. Dalam melakukan kegiatannya, organisasi ini tidak berorientasi pada keuntungan
- c. Kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan anggota seperti yang dilakukankoperasi ataupun organisasi profesi lainnya.

Peran Non Governmental Organization (NGO) dalam ranah politik global dalam perkembangannya menjadi sangat signifikan terutama setelah perang dingin berakhir. Dalam tiga dekade terakhir Non Governmental Organization telah

berkembang dalam hal jumlah, ukuran, maupun keragaman isu yang di menjadi perhatiaanya. Konsep Non Governmental Organization belum menemukan bentuk yang pasti dan masih terdapat perbedaan-perbedaan dalam pendefenisiaanya. Menurut Tujil Non Governmental Organization dapat di definisikan sebagai organisasi independen, tidak memihak, non profit, yang bertujuan untuk meningkatkan hidup orang-orang dengan yang berada dibawah garis kemiskinan dan terpinggirkan. Non Governmental Organization bukanlah bagian dari pemerintah melainkan bagian dari masyarakat yang bertujuan untuk menghubungkan antara masyarakat dan pemerintah untuk mencapai dengan melakukan aksi nyata.

PBB mendefinisikan Non Governmental Organization sebagai organisasi non profit dan voluntary yang terorganisir dalam level lokal, nasional, ataupun internasional. Di dorong oleh masyarakat dengan kepentingan bersama. Non Governmental Organization melakukan berbagai variasi pelayanan dan fungsi kemanusiaan, membawa kekhawatiran masyarakat kepada pemerintah, memonitor kebijakan dan mendorong politik di level komunitas. Non Governmental Organization menyediakan analisis dan keahlian sebagai mekanisme peringatan awal serta membantu memonitor dan mengimplementasikan perjanjian internasional. Beberapa diantaranya terorganisir atas isu spesifik seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan kesehatan.

Sementara itu, Teegen et.al mendefinisikan Non Governmental Organization sebagai organisasi non profit yang bertujuan untuk melayani kepentingan

masyarakat dengan memfokuskan kepada upaya advokasi dan atau oprasional kepada tujuan sosial, politik dan ekonomi, termasuk persamaan, pendidikan kesehatan, perlindungan, lingkungan dan hak asasi manusia. Non Governmental Organization juga dikatakan sebagai ide dari kepentingan masyarakat sipil. Masyarakat sipil sendiri didefinisikan sebagai sebuah area asosiasi dan tindakan yang berdiri sendiri dari negara dimana didalamnya penduduk dapat mengorganisir untuk mencapai tujuan yang penting bagi mereka baik secara individu maupun kolektif. Masyarakat sipil yang juga merujuk kepada sektor tiga atau sektor non profit yang seringkali digunakan untuk mendeskripsikan aspek dari masyarakat yang mmelampui sektor publik dan privat. Asosiasi di dalam masyarakat sipil adalah kesukarelaan dan memiliki karakteristik dimana individu-individu berdatu dengan ide, kebutuhan atau tujuan untuk mempromosikan keuntungan dengan cara melakukan sebuah tindakan kolektif.

Menurut World Bank, berdasarkan aktivitas utamanya Non Governmental Organization dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu oprasional dan advokasi. Yang dimaksud dengan oprasional adalah Non Governmental Organization yang menyediakan barang, keuangan dan jasa untuk masyarakat yang membutuhkan. Non Governmental Organization ini memfokuskan pada perancangan dan implementasi proyek pengembangan suatu isu tertentu dengan mengerakkan sumber daya dalam bentuk keuangan tenaga, material dan keuangan dalam melakukan dan menyelesaikan proyek dan program mereka. Non

Governmental Organization operasional ini dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu:

- a. Organisasi berbasis masyarakat yang melayani suatu populasi khusus dalam suatu daerah geografis yang sempit.
- b. Organisasi nasional yang beroperasi dalam sebuah negara yang sedang berkembang.
- c. Organisasi internasional yang pada dasarnya berkantor pusat di negara maju dan menjalankan operasi di lebih dari satu negara yang sedang berkembang.

Sementara advokasi adalah Non Governmental Organization yang bekerja sebagai representasi dari masyarakat yang tidak memiliki suara atau akses untuk mempromosikan kepentingan mereka. Dalam melakukan advokasi Non Governmental Organization menggunakan berbagai macam cara seperti lobi, berperan sebagai pakar ahli serta penasehat, mengadakan penelitian, membagikan informasi, membentuk agenda ataupun melakukan boikot, dengan tujuan mempertahankan atau memelihara suatu isu khusus dan bekerja untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah untuk atau atas isu-isu yang sedang di perjuangkan. Berlawanan dengan manajemen proyek operasional. Organisasi ini pada dasarnya berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dengan melakukan lobi, kegiatan pers dan kegiatan-kegiatan aktivis. Non Governmental Organization pada dasarnya bekerja melalui advokasi atau

kampanye atas suatu isu dan tidak mengimplementasikan program. Kelompok ini menjalankan fungsi yang hampir sama dengan kelompok operasional, namun dengan tingkatan dan komposisi yang berbeda. Pencarian dana masih perlu namun ukuran yang lebih kecil.

Menurut pengertian diatas, Japan Platform merupakan Non Governmental Organization yang masuk kedalam kategori Non Governmental Organization operasional. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas maupun kegiatan Japan Platform yang menyediakan barang dan jasa yang kritis bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berbeda dengan Non Governmental Organization yang bersifat advokasi karena basis kegiatan mereka hanya terbatas pada lobi-lobi kepada aktor-aktor yang terkait, meningkatkan kesadaran terhadap isu tertentu dan kegiatan-kegiatan aktivis seperti demonstrasi tanpa melakukan implementasi langsung ke masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah di dalam masyarakat. Sedangkan Japan Platform melakukan aksi kemanusiaan dengan cara membantu para korban yang terdampak bencana di Sulawesi Tengah. Japan Platform juga ikut andil dalam membantu proses pemulihan ekonomi dengan cara menyediakan barang, jasa serta dana untuk membantu menyelesaikan masalah perekonomian masyarakat yang terdampak bencana khususnya di Kabupaten Sigi Sulawesi tengah.

B. Bantuan Kemanusiaan (Humanitarian assistance)

Bantuan kemanusiaan menjadi simbol nasionalisme baru antar bangsa-bangsa di dunia. Nasionalisme untuk membangun tata dunia dan transnasionalisme yang lebih makmur dan peka terhadap penderitaan sesama. Nilai-nilai universal yang dipegang oleh banyak bangsa di dunia lahir kembali untuk batas-batas antara manusia satu dengan manusia lainnya.

Pada situs Global Humanitarian Assistance disebutkan bahwa bantuan kemanusiaan dipahami sebagai bantuan yang di tujukan untuk menyelamatkan hidup, menghilangkan penderitaan, menjaga dan melindungi martabat manusia selama dan sesudah situasi darurat akibat bencana. Pemikiran tentang pemberian bantuan kemanusiaan yang melintasi batas-batas teritorial dan ideologis ini berawal pada konsep humanitarian Assistance yang sudah lama muncul dalam hubungan internasional. Humanitarian Assistance berkaitan erat dengan kebijakan Negara yang di buat untuk kepentingan masyarakat. Bantuan kemanusiaan dilakukan untuk menangani bencana alam yang dasyat termasuk banjir, kekeringan, dan tsunami. Bantuan dilakukan terhadap fenomena alam yang sulit diprediksi. Bantuan untuk menanggulangi pasca bencana alam ini dikenal dengan Human Disaster Relief yang merupakan upaya untuk memberikan bantuan bagi negara yang sangat membutuhkan. Program ini umumnya diberikan kepada negara-negara yang sedang dalam masa pemulihan setelah akibat konflik atau peperangan yang berkepanjangan atau juga kepada negara-negara yang baru mengalami bencana

alam yang menimbulkan kerusakan material luar biasa dan menelan korban jiwa manusia yang sangat banyak.

Dalam konsep Humanitarian Assistance, pemberian bantuan kemanusiaan harus menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, netral, adil, dan berdiri sendiri. Prinsip tersebut juga terimplementasi di dalam Humanitarian Charter and minimum standart in Humanitarian response yang di rancang pada tahun 1997-1998 oleh Sphere project bersama dengan IFRC, IGO, NGO. Dalam kode etik tersebut di sebutkan sepuluh standart sikap dan perilaku yang harus di junjung tinggi suatu organisasi kemanusiaan dalam memberikan bantuan kemanusiaan ke suatu negara yang terjadi karna bencana dan membutuhkan bantuan kemanusiaan, yakni The Code Of Conduct: Principles of conduct for the international red cross and red crescent movement and NGOS in disaster response programmes:

- a. Panggilan kemanusiaan di utamakan terlebih dahulu, untuk menerima bantuan kemanusiaan dan untuk menawarkannya adalah prinsip kemanusiaan fundamental yang harus dinikmati oleh semua warga negara dari semua negara. sebagai anggota masyarakat internasional, harus disadari jika sudah menjadi kewajiban untuk memberikan bantuan kemanusiaan dimanapun dibutuhkan oleh karna itu, akses tanpa hambatan ke masyarakat yang terkena dampak bencana sangat penting dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Motivasi utama respon terhadap bencana adalah meringankan penderitaan akibat bencana. Saat

memberikan bantuan kemanusiaan harus terlepas dari tindakan partisipan atau politi.

- b. Bantuan diberikan tanpa memandang ras, agama, atau kebangsaan dan tanpa pilih kasih. Prioritas bantuan di tentukann semata-mata berdasarkan pada kebutuhan, sebisa mungkin pemberian bantuan di dasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap kebutuhan korban bencanadan kapasitas lokal yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- c. Bantuan kemanusiaan tidak digunakan untuk kepentingan politik dan agama tertentu, bantuan kemanusiaan akan diberikan sesuai kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat.
- d. Bantuan darurat harus bisa mengurangi penderitaan di masa mendatang dan memenuhi kebutuhan dasar. Berusaha untuk menerapkan program bantuan yang akan mengurangi penderitaan korban bencana di masa mendatang dan membantu menciptakan gaya hidup yang berkelanjutan.

Dari poin-poin di atas dapat kita ketahui bahwa konsep Humanitarian Assistance membutuhkan kesukarelaan dalam melakukan setiap kegiatannya., meskipun dalam pelaksanaannya sering terjadi politisasi, meskipun memang mudah sekali mempolitisasi bantuan bencana mengingat persaingan dunia global membuat negara-negara saling bantu atau saling menjatuhkan bahkan juga bisa melakukan keduanya.

C. Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan teori baru dalam Hubungan Internasional (HI) yang muncul pada akhir tahun 1997 sebagai hasil dari konferensi internasional para ahli HI diberbagai negara yang dilaksanakan di Kora Aarhus-Norsminde, Denmark (Bakry, 2017). Pendekatan ini muncul dikarenakan kegagalan para sarjana HI dalam menjelaskan dan memprediksikan berakhirnya Perang Dingin yang terkesan mendadak berdasarkan teori-teori yang ada pada saat itu khususnya neo-realisme dan neo-liberalisme.

Munculnya konstruktivisme membuat studi Hubungan Internasional tidak hanya terfokus pada masalah isu High-Politics saja melainkan juga membuka peluang untuk menjelaskan fenomena Low-Politics seperti masalah isu gender dan etnisitas yang selama ini terabaikan. Kaum konstruktivis menekankan sebuah perspektif antropologis dan sosiologis mengenai politik internasional yang berupa norma, peran identitas dalam proses pembentukan tindakan dan kepentingan, serta hubungan timbal balik antara “agen” dan “struktur” (Price & Reus-Smit, 1998).

Sebagai pendekatan baru yang hadir dalam studi Hubungan Internasional, konstruktivisme memiliki perbedaan asumsi dengan neo-realisme dan neo-liberalisme, dimana teori ini menekankan pada dimensi sosial dalam Hubungan Internaional, kemungkinan perubahan dunia internasional, dan mengutamakan penekanan pada variabel-variabel non-material seperti norma, kebudayaan, identitas, dan gagasan untuk memberikan penjelasan terhadap perilaku aktor dalam HI (Bakry, 2017).

Fakta sosial merupakan hasil dari konstruksi buatan manusia yang eksistensinya tergantung pada tindakan manusia itu sendiri. Begitu juga dengan fakta mengenai fenomena atau isu dalam HI yang merupakan hasil/output dari konstruksi manusia dan tergantung pada tindakan manusia itu. Sehingga sistem internasional tidak bersifat given namun dapat diubah dari pemahaman masing-masing aktor. Konstruktivisme melihat para aktor dalam sistem internasional sebagaimana yang berada di lingkungan mereka, yang memengaruhi dan mengubah mereka. Dengan demikian, perilaku negara-negara dalam HI dibentuk dari berbagai faktor yang dikonstruksi secara sosial seperti misalnya identitas sikap dan keyakinan para decision maker (Wendt, 1992).

Menurut Alexander Wendt, konstruktivisme merupakan teori struktural yang memiliki asumsi, yaitu :

- (1) negara merupakan aktor utama dalam HI dan unit analisa dalam teori politik internasional
- (2) struktur utama dalam sistem internasional sifatnya intersubjektif, bukan material seperti neo-realis dan neo-liberal
- (3) identitas dan kepentingan negara dibangun berdasarkan 'konstruksi' sosial yang mereka bangun, dan tidak bersifat given.

Dari ketiga poin diatas, maka suatu negara akan membentuk gagasan/ide dalam memahami fenomena HI berdasarkan struktur di tempat mereka saling melakukan interaksi satu sama lain, serta bertindak berdasarkan anggapan konstruksi yang mereka ciptakan (Bakry, 2017).

Selain itu, teori konstruktivis dibangun berdasarkan empat asumsi menurut Joseph Grieco, yaitu

1. suatu bentuk kepentingan baik itu individu, kelompok, maupun negara tidak bersifat given, melainkan terbentuk dari identitas para aktor dan bagaimana orang lain melihat para aktor tersebut .
2. faktor ide atau gagasan dan budaya, ilmu pengetahuan, agama, dan keyakinan normati sebagai pembentuk identitas.
3. elit individu baik dalam suatu negara menjadi aktor yang paling penting untuk memengaruhi cara pandang dan perilaku masyarakat di suatu negara dalam sistem internasional;
4. peran komunikasi atau interaksi antar elit dengan jaringan tempat dimana mereka beroperasi dalam rangka pembentukan dan perubahan identitas demi memperkuat gagasan dan keyakinan (Grieco, 2015).

BAB III

PROFIL JAPAN PLATFORM DAN DAERAH TERDAMPAK BENCANA

SULAWESI TENGAH

A. Sejarah singkat dan visi Japan Platform

Japan Platform merupakan International Non-Governmental Organization yang memiliki kantor pusat di Jepang, saat ini japan Platform diketuai oleh Shusai Nagai sejak tahun 2018. International Non Governmental Organization ini didirikan oleh Noboru Ishizaki yang merupakan seorang laksamana belakang Jepang di Angkatan Laut Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II, hal ini berawal dari kepedulian Noboru Ishizaki pada korban konflik kosovo, karna terjadinya krisis kesehatan masyarakat, krisis pangan dan kelaparan dan pada akhirnya menimbulkan korban manusia. (Japan Platform, 2009).

Melihat nasib korban yang mengalami krisis tersebut Noboru Ishizaki mengajak beberapa komunitas peduli masyarakat di jepang, pengusaha serta pemerintah untuk membuat komunitas konsorsium dalam membantu korban konflik kosovo pada tahun 1999, kemudian pada tahun 2000 Noboru Ishizaki membentuk Non-Governmental Organization yang meperjuangkan pendidikan anak-anak akibat hal-hal yang berbahaya yang terjadi disekitar mereka, seperti konflik dan bencana alam.

Setelah pembentukannya pada tahun 2000 Japan Platform berkembang

menjadi organisasi yang membantu masyarakat di Jepang yang berada dibawah garis kemiskinan yang mengalami kelaparan dan belum sepenuhnya terbantu oleh Pemerintah Jepang.

Misi Japan Platform adalah untuk memperluas bantuan Jepang secara global yang diharapkan mampu menciptakan dunia di mana semua individu dapat membuka jalan menuju masa depan. (Japan Platform, 2009). Japan Platform juga memiliki nilai-nilai global untuk mencapai misi yang terkandung dalam organisasi ini yaitu :

1. Japan Platform memiliki tujuan dan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas dari segala kegiatan yang dilakukan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2. Japan Platform dalam mengembangkan dan menjalankan program programnya berupaya untuk selalu menghormati keberagaman, menghargai satu sama lain dan bekerja dengan partner untuk memanfaatkan kekuatan global agar menciptakan keadaan yang lebih baik untuk anak-anak.
3. Membangun masyarakat di mana orang-orang dengan latar belakang berbeda dapat hidup bersama di bawah semangat koeksistensi dan kemandirian.
4. Kreativitas Japan Platform selalu terbuka untuk ide-ide baru, merangkul perubahan, dan mengambil resiko untuk mengembangkan solusi berkelanjutan untuk masyarakat.

B. Strategi dan pendanaan Japan platform

Dalam melakukan kegiatan-kegiatannya Japan Platform memiliki tiga strategi utama yaitu :

1. Mobilisasi pengetahuan, pengetahuan adalah inti dari kerja Japan Platform dimana mereka mengembangkan dan mengkomunikasikan ilmu pengetahuan sebagai mekanisme inti yang dipakai untuk memperoleh perhatian, mengkomunikasikan, melatih dan menyakinkan pihak lain. Japan Platform menyediakan informasi terkait pendidikan dan kemiskinan. Dalam mengembangkan pengetahuan tersebut Japan Platform memiliki jaringan yang terdiri dari kelompok spesialis, dan asosiasi grup. Kelompok spesialis terdiri dari ilmuan yang memiliki tugas menyediakan informasi dan saran dalam mendukung program Japan Platform, sedangkan asosiasi grup ini terdiri dari ahli yang memiliki tugas pelaksanaan, kerja lapangan, meneliti dan mengembangkan proposal.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk membuka peluang dalam bertindak dengan cara menyoroti dan menarik perhatian secara kritis dengan cara mengejutkan terkait fakta pendidikan dan kemiskinan. Berdasarkan dari pengalam Japan Platform, dengan menyoroti kemiskinan yang terjadi di Jepang pada awal tahun 2000 dimana menyebabkan warga kelaparan sebanyak 700 orang di dukung dengan informasi yang akurat dari para ahli dapat memberikan dampak yang besar, selain itu Japan Platform

juga bekerjasama dengan organisasi yang memiliki tujuan yang sama untuk memaksimalkan jangkauan dan dampak dari kerjasama tersebut.

3. Mendorong masyarakat untuk bertindak, dalam hal ini Japan Platform lebih bertindak dalam menyediakan pengetahuan, membangun kapasitas lokal dan membuka akses dalam peluang finansial, serta mendorong aktivitas pengelolaan program pelatihan bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatannya seringkali Japan Platform menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti LSM, Pemerintah, Perusahaan, dan Institusi pendidikan. (Japan Platform, 2009).

Terkait dengan pendanaan, Japan Platform tidak dipenden dengan satu donor saja. Hal ini untuk memperkecil resiko apabila terjadi perubahan anggaran dana yang tidak terduga. Japan Platform menerima pendanaan atau donor dari pemerintah, Organisasi dan konvensi Nasional, serta NGO lain. Pendanaan terdiri dari projek pendapatan, projek dari anggota dan sumber lainnya. Terkait dengan keanggotaan Japan Platform memiliki 43 anggota dari Non-Governmental Organization yang tergabung dalam *JPF'S member NGO's* .

C. Dampak dan Kerugian akibat Bencana alam Sulawesi Tengah

Bencana alam yang melanda tiga wilayah di Sulawesi tengah yaitu Palu, Sigi, dan Donggala pada 28 September 2018 yang di sebabkan oleh gempa bumi bawah laut yang mengakibatkan pergeseran secara vertikal di dasar laut. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut

kota Palu, dengan magnitud 7,7 pada kedalaman pusat gempa 10 km dan ketinggian 2,2 hingga 11,3 meter. (BNKG, 2018). Disaat yang bersamaan pula Balaroa, Petobo dan Sebagian Kabupaten Sigi mengalami Likuifaksi setelah terjadinya Gempa 10.1 SR.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jumlah korban jiwa secara keseluruhan ditaksir kurang lebih mencapai 177,401 jiwa. Sementara korban meninggal mencapai 2.685 jiwa, Selain itu sebanyak 10.679 orang cedera, 701 orang hilang, dan 172,999 jiwa menjadi pengungsi. (BNPB, 2018).

DATA KORBAN JIWA

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KORBAN JIWA			TOTAL KORBAN JIWA PER KAB/KOTA
		JIWA MENINGGAL	JIWA HILANG	KORBAN DIKUBUR MASSAL	
1	PALU	2,132	531	1,016	3,679
2	SIGI	289	116	0	405
3	DONGGALA	249	54	0	303
4	PARIGI MOUTONG	15	0	0	15
TOTAL		2,685	701	1,016	4,402

DATA PENGUNGSIS

NO	KAB/KOTA	KONDISI PENGUNGSIS		
		TITIK PENGUNGSIS	KK	JIWA
1	PALU	127	11,165	40,738
2	SIGI	160	29,867	93,187
3	DONGGALA	98	11,478	36,346
4	PARIGI MOUTONG	15	662	2,728
TOTAL		400	53,172	172,999

* SUMBER DATA KAB/KOTA TERDAMPAK (30 Januari 2019)

Dapat dipastikan fasilitas penerangan, komunikasi, dan sarana umum

lumpuh total akibat bencana tersebut. Bencana ini menyebabkan korban yang selamat terpaksa harus bertahan makan dan minum seadanya selama 3-7 hari di tengah puing-puing bencana, kubangan sampah, dan jasad manusia, karna proses evakuasi yang berjalan lambat yang di akibatkan oleh rusak bahkan putusnya jalur perhubungan. Diperlukan suatu kesiapan, baik dalam pembentukan institusionalisasi kebencanaan, kebijakan dan program kerja serta dana untuk mitigasi bencana, kedaruratan hingga rehabilitasi dan rekonsiliasi pasca bencana.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana kerusakan dan kerugian pasca terjadinya bencana alam di perkirakan mencapai Rp 13,53 triliun. (BNPB, 2018). Kerusakan dan kerugian untuk sektor sosial mencakup perumahan, toko, perkantoran, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan tempat ibadah. Selain itu, gempa bumi dan tsunami telah berdampak besar bagi lingkungan pesisir, menyebabkan kerusakan dan hilangnya hewan, tumbuhan, habitat, dan fungsi ekosistem yang penting.

Selain kehilangan tempat tinggal, hanya sedikit pengungsi yang tinggal bersama orang-orang di komunitas mereka sendiri. Mereka kehilangan banyak teman dan anggota keluarga, dan kehilangan seluruh lingkungan dan komunitas. Interaksi sosial dan ekonomi juga hilang. Dampak lebih lanjut pada mata pencaharian dan tentu saja berarti kualitas hidup yang sangat buruk bagi banyak orang. Bencana besar ini telah menghapuskan modal sosial serta

kepercayaan diri para korbannya dalam sekejap. Sulit bagi banyak individu untuk memikirkan masa depan, karena masih berjuang melawan trauma dan tuntutan sehari-hari serta mencoba memahami bagaimana kehidupan telah sangat berubah. Korban pasca bencana masih merasa takut akan adanya gempa, tsunami dan likuifaksi susulan. (Eva Susanti Bande, 2018)

Ada banyak efek trauma yang di rasakan oleh korban bencana alam ini, Paling buruk, individu tidak mampu dan membutuhkan perawatan medis. Bagi banyak orang, kehidupan dan mata pencaharian terus berlanjut, namun akan terpengaruh dengan berbagai cara. Orang-orang ini membutuhkan konseling dan dukungan publik. Laporan dari kunjungan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat bingung, memberikan banyak peluang untuk masuknya rumor dan tambahan rasa takut serta panik. Tenaga profesional untuk kesehatan mental dibutuhkan untuk membantu korban yang mengalami trauma, dan pemograman yang menyertakan konseling yang luas melalui sekolah, organisasi masyarakat, dan juga LSM sangat di perlukan.

Selain sensitif terhadap efek trauma pasca bencana, sangat penting untuk disadari bahwa peran sosial dan peran berbagai elemen pendukung yang berbeda untuk korban bencana bagi wanita, pria, anak-anak dan lansia akan menciptakan reaksi yang berbeda terhadap kejadian traumatis yang membutuhkan berbagai mekanisme penanganan untuk setiap individu dan jenis kelamin.

Estimasi Kerusakan dan Kerugian Akibat Gempa Bumi dan Tsunami

Sulawesi Tengah 2018

NO	AREA TERDAMPAK	KERUSAKAN	KERUGIAN
1	Sektor Permukiman	268.451 unit rumah,	Rp 7,95 trilyun
2	sektor infrastruktur	jalan 168 titik retak, jembatan 7 unit, station listrik 10 unit	Rp 701,8 milyar
3	Sektor ekonomi produktif	toko 362 unit, kafe 125 unit,	Rp 1,66 trilyun,
4	sektor sosial	327 unit rumah ibadah, 265 unit sekolah, perkantoran 78 unit, mall 1 unit	Rp 3,13 tilyun

*sumber data BNPB, 2018

D. Peran Japan Platform dalam bencana di Sulawesi Tengah

Pasca bencana, dengan skala kerusakan dan korban yang luar biasa besar, proses tanggap darurat yang dilakukan sangatlah kompleks, dan tidak cepat. Dalam situasi di mana hampir sebagian besar kapasitas pemerintah daerah yang lumpuh, upaya-upaya tanggap darurat sepenuhnya banyak mengandalkan kedatangan para sukarelawan dari luar daerah, bahkan luar negeri. Berbagai elemen dalam negeri yang terlibat mulai dari pemerintah hingga masyarakat turut

membantu dalam proses tanggap darurat bencana tersebut. Masyarakat menggalang dana dan bahu membahu untuk menjadi relawan di Palu, Sigi dan Donggala yang telah porak poranda.

Japan Platform yang merupakan salah satu Non Governmental Organization yang berasal dari Jepang bekerjasama dengan Lsm lokal yaitu KPKP-ST yang merupakan Lsm yang berbasis di Palu dan mempunyai kantor di Sigi maupun donggala sehingga dengan informasi yang di dapatkan dari pihak kedua, Japan Platform segera bekerjasama dengan KPKP-ST 3 hari setelah musibah tersebut terjadi dalam proses penyelamatan, perawatan korban dan pemulihan sarana dan prasarana. (Japan Platform, 2009).

Peran Japan Platform dalam masa kedaruratan di Palu, Sigi dan Donggala adalah memobilisasi asetnya untuk mendukung usaha pemerintah melalui Lsm lokal yaitu KPKP-ST dalam memberikan bantuan pangan bagi korban yang terdampak bencana. Guna mendukung upaya tersebut, Japan Platform mendirikan tenda besar di tiga wilayah terdampak bencana untuk mengelola operasi bantuan dan pusat logistik utama untuk keadaan darurat.

Japan Platform saling bahu membahu dengan masyarakat, pemerintah di indonesia dan Lsm lokal yaitu KPKP-ST dalam menuntaskan masa tanggap darurat Sulawesi Tengah, yang dapat dikelompokkan dalam tiga kegiatan utama yaitu .

1. Kegiatan tahap pertama

pertolongan pertama yang dilakukan oleh pihak Japan Platform yaitu pada korban yang membutuhkan pengobatan, makanan dan pakaian. Japan Platform yang bekerjasama dengan KPKP-ST menyalurkan bantuan kepada korban terdampak bencana sekaligus melakukan pendataan kembali yang nantinya akan di berikan bantuan tahap selanjutnya.

2. Kegiatan tahap kedua

Kegiatan tahap dua yang dilakukan oleh japan platform yaitu pengadaan bantuan kesehatan, bantuan makanan, bantuan shelter atau peneuh, berupa tenda-tenda dan terpal-terpal. Tahap kedua ini Japan Platform melakukan pendataan kembali untuk bantuan tahap ketiga.

3. Kegiatan tahap ketiga

bantuan psikologis dan pengorganisasi sosial untuk korban yang terpisah dari keluarga-keluarga atau pendampingan korban yang kehilangan anggota keluarganya pasca bencana. Para korban ini membutuhkan pertolongan psikologis dan penenangan mental dan perlu perhatian khusus dimana tahap ini dilakukan selama 3 sampai 1 tahun.

E. KPKP-ST (Lsm Partner)

Kelompok Perjuangan dan Kesetaran Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST) yang di bentuk oleh Soraya Sultan dan Eva Susanti Bande pada tahun 2002 ini bertujuan untuk memperjuangkan Hak Asasi Perempuan, kehidupan yang layak, serta kesejahteraan dalam ranah perempuan. KPKP-ST sebagai Lsm

yang beroperasi di Palu yang berkomitmen terhadap kemanusiaan dan kesejahteraan perempuan ikut serta dalam memberikan berbagai macam bantuan untuk para korban bencana di Sulawesi tengah tahun 2018. Sebanyak 50 relawan berkontribusi dalam misi kemanusiaan turun ke lokasi bencana pada proses tanggap darurat bencana di Palu, Sigi dan Donggala.

KPKP-ST adalah salah satu LSM lokal di Palu yang ikut melakukan evakuasi korban selamat dan penyampaian tanggapan kesehatan darurat, distribusi makanan dan non-makanan, air bersih, dan tempat penampungan. KPKP-ST telah menyediakan sejumlah besar barang bantuan, unit bantuan darurat untuk memasok air minum, layanan kesehatan, dan logistik.

Lebih lanjut, KPKP-ST bekerjasama dengan Japan Platform dalam melakukan pemberian bantuan karena ketidaksanggupan LSM lokal dan pemerintah setempat dalam memenuhi kebutuhan korban pasca bencana di tiga wilayah terdampak yaitu Palu, Sigi dan Donggala. Oleh karena itu, KPKP-ST segera bekerjasama dengan Japan Platform sesaat setelah musibah tersebut terjadi. Tiga hari setelah tsunami, gempa dan likuifaksi terjadi, para relawan dari pihak Japan Platform dan KPKP-ST memberikan bantuan 1.000 terpal untuk membuat tempat penampungan sementara, dan perlengkapan rumah tangga untuk 800 pengungsi. Perlengkapan tersebut terdiri dari kebutuhan dasar, pakaian, dan perlengkapan kebersihan.

F. Profil daerah terdampak akibat Bencana alam Sulawesi Tengah

1. Profil Kabupaten Donggala

Sebelah Utara	berbatasan dengan Kabupaten Tolitoli dan Kota Palu
Sebelah Timur	berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong, Kota Palu dan Kabupaten Sigi
Sebelah Selatan	berbatasan dengan Sulawesi Barat, Kota Palu dan Kabupaten Sigi
Sebelah Barat	berbatasan dengan Selat Makassar dan Sulawesi Barat

Kabupaten Donggala terletak antara $0^{\circ},30''$ Lintang Utara dan $2^{\circ},20''$ Lintang Selatan serta $119^{\circ},45''$ - $121^{\circ},45''$ Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Luas Wilayah

Kabupaten Donggala pada saat ini memiliki wilayah seluas 5.275,69 Km² yang terbagi atas 16 kecamatan yaitu: Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Pinembani, Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan

Banawa Tengah, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Damsol, Kecamatan Sojol, dan Kecamatan Sojol Utara. (Donggala. 2019).

b. Potensi Bahaya dan Risiko

Terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Donggala masuk dalam kawasan lempeng tektonik aktif, terutama dengan keberadaan Sesar Palu-Koro. Oleh karena itu, kabupaten ini berpotensi mengalami gempa bumi besar, tsunami, banjir, dan kebakaran hutan. Perubahan iklim di masa mendatang cenderung memperbesar intensitas badai ekstrem yang mengakibatkan banjir besar. Kabupaten Donggala memiliki Angka Indeks Risiko Bencana BNPB 189 (tinggi) dan menduduki peringkat ke-80 dari 496 kabupaten yang memiliki resiko bencana.

c. Kerentanan Lingkungan Alam

Kondisi topografi yang terjal di Kabupaten Donggala, menyebabkan sebagian besar areanya memiliki potensi rawan longsor, aliran debris, dan erosi. Potensi-potensi bahaya ini pada akhirnya juga menyebabkan sejumlah besar endapan sedimen (tanah dan batuan) hasil dari longsor, debris dan erosi mengisi dasar sungai dan menyebabkan potensi bencana banyak banjir lebih besar serta

pertambahan endapan sedimen di daerah pesisir. selain itu di daerah pesisir pantai, hilangnya hutan bakau juga telah menyebabkan meningkatnya abrasi pantai. Daerah dataran rendah di pantai juga berisiko terkena intrusi garam dari gelombang pasang dan tsunami. Banjir sering terjadi di Kabupaten Donggala selama musim hujan, sedangkan kekeringan sering terjadi di musim kemarau. Perubahan iklim di masa depan mungkin akan meningkatkan keparahan banjir dan kekeringan.

d. Lingkungan Ekonomi

Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain disektor pertanian dengan komoditi yang dihasilkan berupa kakao, kelapa dalam, kopi robusta, cengkeh, lada, jambu mete, dan cengkeh. Untuk kegiatan pertanian didaerah ini, hasil pertanian yang utama berupa bahan tanaman pangan berupa padi, tanaman hortikultura, dan palawija. Tanaman bahan pangan tentunya dengan padi sebagai primadona di samping jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian menjadi ujung tombak kegiatan ekonomi secara keseluruhan (palu.bpk.2019).

e. Kondisi pasca gempa

merupakan wilayah terdampak gempa dan tsunami. Kondisi Donggala terpantau cukup parah, khususnya di wilayah yang dekat dengan garis pantai. Banyak bangunan roboh dan sejumlah jenazah yang terjebak belum dapat

dievakuasi. Warga juga belum menerima bantuan logistic (metrotvnews.2019).

2. Profil kabupaten Sigi

Sebelah Utara	berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kota Palu
Sebelah Timur	berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Poso.
Sebelah Selatan	berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan
Sebelah Barat	berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Provinsi Sulawesi Barat.

Kabupaten Sigi terletak di sebelah selatan Lembah Palu. Wilayah geografisnya terbentang pada koordinat 0o 52' 16" Lintang Selatan (LS) hingga 2 o 03' 21" LS dan 119 o 38' 45" Bujur Timur (BT) hingga 120 o 21' 24 BT.

a. Luas wilayah

Luas wilayah daratan Sigi adalah 5.196,02 Km² atau sekitar 7,64 persen dari total luas daratan Sulawesi Tengah. Berdasarkan letak geografisnya, Sigi menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak

memiliki garis pantai, dengan batas-batas wilayah

b. Secara administratif

Kabupaten Sigi terbagi menjadi 15 kecamatan, 156 desa dan 1 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Kabupaten Sigi beribukota di Bora, sekitar 16 Km dari Kota Palu. Secara umum, wilayah Kabupaten Sigi dapat ditempuh melalui jalur darat dengan jarak antar ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten yang beragam. Ketinggian wilayah Kabupaten Sigi berkisar 32-1.350 m, dimana titik terendah berada di Kantor Camat Dolo (Kota Pulu) dan tertinggi di Kantor Camat Marawola Barat (Dombu).

c. Geologi Kabupaten Sigi

Secara geografis dan proses geologis daratan di Sulawesi Tengah khususnya di Wilayah Kabupaten Sigi terbentuk karena adanya kegiatan tektonik sehingga terjadi proses pengangkatan dan penurunan. Adanya pengangkatan dan penurunan menyebabkan adanya beberapa permukaan tanah terangkat cukup tinggi. Secara fisiografis, daerah ini dibangun oleh rangkaian pegunungan dengan celah yang sempit dan dalam. Di bagian barat terdapat pelurusan lembah yang mempunyai arah barat laut-selatan selatan tenggara (Lembah Palu, Lembah Mui, Lembah Halua, Lembah Koro, Lembah Leboni terus masuk ke Teluk Bone) dan merupakan ekspresi morfologi.

d. Keadaan Demografis Umum

- Sesuai hasil data kependudukan tahun 2016, populasi Kabupaten Sigi mencapai 212.613 jiwa dengan 109.502 jiwa penduduk laki-laki dan 103.112 jiwa penduduk perempuan.
- Pada akhir tahun 2016 kepadatan penduduk tercatat sebanyak 41 jiwa/km², dengan luas wilayah Kabupaten Sigi 5.196,02 km².
- Rasio jenis kelamin di Kabupaten Sigi Tahun 2016 adalah sebesar 106, yang berarti setiap 106 laki-laki terdapat 100 perempuan.
- Indeks pembangunan manusia mencapai angka 69.45%

e. Kondisi pasca gempa

Akses jalan yang terputus masih menjadi kendala utama yang harus dihadapi untuk menuju Wilayah Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Wilayah ini termasuk daerah yang cukup parah terkena gempa dan longsor. akses listrik dan saluran komunikasi di wilayah ini masih terputus, kurang perlengkapan dan fasilitas di Hunian Sementara. Di tempat ini ratusan rumah hancur tak berbentuk usai terkena gempa (tribunnews.com).

3. Profil Kota Palu

Sebelah Utara	berbatasan dengan Kabupaten donggala.
---------------	---------------------------------------

Sebelah Timur	berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala.
Sebelah Selatan	berbatasan dengan Kabupaten Sigi
Sebelah Barat	berbatasan dengan Kabupaten Donggala

Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah terletak pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Wilayahnya terdiri dari lima dimensi yaitu wilayah pegunungan, lembah, sungai, teluk dan lautan. Secara astronomis, Kota Palu berada antara $0^{\circ},36''$ - $0^{\circ},56''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ},45''$ – $121^{\circ},1''$ Bujur Timur, sehingga tepat berada digaris Khatulistiwa dengan ketinggian 0-700 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Kota Palu mencapai 395,06 kilometer persegi yang terbagi menjadi delapan kecamatan.

a. Luas wilayah

Secara astronomis, Kota Palu berada antara $0^{\circ},36''$ - $0^{\circ},56''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ},45''$ – $121^{\circ},1''$ Bujur Timur, sehingga tepat berada digaris Khatulistiwa dengan ketinggian 0-700 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Kota Palu mencapai 395,06 kilometer persegi yang terbagi menjadi delapan kecamatan.

b. Kondisi pasca gempa

Bencana dalam skala cukup besar, kata Sutopo, langsung menyusutkan kapasitas produktif dalam skala besar yang berakibat kerugian finansial yang besar juga. Bahkan, pertumbuhan pembangunan di wilayah terdampak bencana menjadi minus atau mengalami kemunduran dalam rentang waktu tertentu



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Upaya Japan Platform Dalam Pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana

Pasca bencana di Sulawesi Tengah, Indonesia mendapat simpati dan perhatian dunia sehingga negara-negara dan Organisasi Internasional maupun Organisasi Non Pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri bergerak untuk memberikan bantuan dalam jumlah yang besar. Berbagai macam bantuan diberikan seperti, bantuan dana, bantuan pangan, sanitasi, shelter, transportasi udara, bantuan medis, dan lain sebagainya. Bantuan internasional pun datang dengan berbagai bentuk mulai dari personil dan perlengkapan evakuasi, tim dan peralatan medis hingga militer.

Organisasi internasional yang ikut serta dalam memberikan bantuan pasca bencana di Sulawesi Tengah ialah United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), United Nations Children's Fund (UNICEF), International Rescue Committee (IRC), International Federations of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), sedangkan bantuan yang berasal dari organisasi Non Pemerintah yaitu Japan Platform (JPF), Save The Children, Association for Aid and Relief (*AAR Japan*) dan bantuan negara-negara asing seperti, Amerika Serikat, Australia, Jepang Jerman, Singapura, China, dan negara lainnya.

Bantuan ini banyak di realisasikan dalam bentuk proyek-proyek rehabilitasi, pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana pasca bencana yang di lakukan oleh berbagai Organisasi internasional maupun organisasi Non Pemerintah. Beberapa

organisasi kemanusiaan pun datang secara bersamaan untuk membantu menyelesaikan dan atau meminimalisir resiko dampak bencana untuk para korban gempa, tsunami dan likuifaksi. Terkait dalam hal ini Japan Platform yang merupakan salah satu Non Governmental Organization yang berasal dari Jepang ikut serta dalam melakukan kegiatan rehabilitasi dan pemulihan di Palu, Sigi dan Donggala pasca bencana dengan proyek Assisting Economic Empowerment for Earthquake and Tsunami Recovery in Central Sulawesi. Proyek ini di mulai dari 21 November 2018 sampai dengan 21 November 2019 dipimpin oleh Japan Platform yang bekerjasama dengan KPKP-ST. Proyek ini berbeda dengan proyek lainnya karna menggabungkan upaya pemulihan dan pemberdayaan dengan menjalankan beberapa kegiatan dalam proses pemulihan. Kegiatan kegiatan yang di lakukan Japan Platform dalam proyek ini yaitu meliputi:

1. Pemberdayaan Pendidikan

Upaya Japan Platform dalam Pemberdayaan Pendidikan dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi ibu-ibu penyintas kemiskinan yang berada di Sigi untuk mengasah kemampuan mereka dan memberikan informasi serta menambah wawasan. Pemberdayaan pendidikan yang dilakukan oleh Japan Platform dan KPKP-ST dalam proyek Assisting Economic Empowerment sangat menekankan pelatihan keterampilan yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan peluang usaha menuju ekonomi produktif. Selain pelatihan keterampilan ibu-ibu penyintas kemiskinan juga diberi pelatihan dalam menyusun rencana bisnis,serta kelayakan produksi sebuah produk yang akan dihasilkan

Pemberdayaan Pendidikan ini juga merupakan sebuah upaya yang dilakukan Japan Platform dalam mendorong semangat, motivasi, perilaku, dan kemampuan ibu-ibu penyintas kemiskinan yang tergabung dalam kelompok industri rumahan yang di mobilisasi oleh Japan Platform dan KPKP-ST dalam menangani kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan dan menerapkan cara kerja, teknologi dan produk dengan harga jual tinggi secara efisiensi guna memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.

2. Pengenalan Wirausaha

Pengenalan kewirausahaan merupakan salah-satu upaya yang dilakukan Japan Platform untuk menumbuh kembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan ibu-ibu penyintas kemiskinan di kabupaten Sigi sehingga mereka memiliki nilai dan ciri kewirausahaan dalam rangka mend/ingkatkan usahanya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul pasca bencana karna terputusnya sumber pendapatan serta mengatasi kemiskinan yang terjadi akibat bencana alam.

Selain pengenalan wirausaha Japan Platform juga melakukan pengembangan inovasi dan kreativitas sehingga ibu-ibu penyintas kemiskinan yang tergabung dalam proyek Assisting Economic Empowerment mampu membaca peluang, misalnya dalam memanfaatkan limbah, barang bekas maupun sumber daya alam lokal menjadi sebuah produk yang bernilai jual tinggi. Limbah sampah organik dapat diubah

menjadi pupuk kompos, limbah bungkus plastik, kayu, kain dapat diubah menjadi produk kerajinan, misalnya hiasan dinding yang terbuat dari rotan, bunga hias yang terbuat dari limbah plastik, serta sumber daya alam lokal yang bisa diciptakan menjadi bumbu dapur seperti kecap serta buah kelapa yang tidak hanya bisa di olah menjadi minyak goreng akan tetapi juga di buat menjadi dodol kelapa yang bisa bersaing di pasaran. Pengembangan inovasi dan kreativitas ini merupakan sebuah upaya yang sangat penting karna dapat mendorong seseorang untuk berani mencoba hal baru serta dapat memanfaatkan peluang usaha.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Merupakan upaya Japan Platform dalam menciptakan serta mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui peningkatan kesadaran dan percaya diri, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan sosial, politik, dan budaya agar mampu dan dapat menjangkau akses sumber daya alam, permodalan, teknologi, dan pasar sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hukum, lingkungan, dan sosial politik. Pengembagn ini bisa dilakun melalui pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat seperti :

- a) Kerajina anyaman bahan bambu,kerajinan bahan limbah rumah tangga, menjahit, Bordir, sablon membuat tas dll.
- b) Pembuatan kecap, pembuatan dodol kelapa, pembuatan minyak kelapa,dll.

c) Jasa laundry, dan salon potong rambut.

d) Hiasan dinding dari rotan

4. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Rakyat

Pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat tumbuh dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kemiskinan yang terjadi akibat bencana sehingga dilakukan pengembangan melalui pembinaan dan pelatihan kepada ibu-ibu penyintas kemiskinan di Kabupaten Sigi dalam bidang ekonomi secara berkelompok. Kegiatan dalam proyek Assisting Economic Empowerment ini diharapkan agar semua anggota kelompok bisa saling mengenal karakter masing-masing, percaya, serta mempunyai kepentingan yang sama melalui pembentukan kelompok industri rumahan, dengan tujuan mampu menciptakan kerjasama yang baik dan serasi sehingga menciptakan dan meningkatkan kepercayaan diri dalam berinovasi dan serta mengeluarkan pendapat dan ide-ide yang akan berpotensi dalam meningkatkan keberhasilan proyek yang dilaksanakan oleh Japan Platform dan KPKP-ST dalam pemulihan ekonomi di Kabupaten Sigi.

5. Monitoring dan Evaluasi

Tujuan dari monitoring yaitu untuk memeriksa pelaksanaan program yang dilakukan oleh ibu-ibu penyintas kemiskinan yang bergabung dalam proyek Assisting Economic Empowerment dalam proses pemulihan ekonomi masyarakat dilapangan, yang akan menghasilkan masukan dan saran terkait

realisasi dari program yang telah berjalan. Monitoring dilakukan oleh staf Japan Platform dan KPKP-ST.

Pelaksanaan motiring dan evaluasi ini, selain menjadi tolak ukur berjalannya proyek yang dijalankan oleh Japan Platform juga menjadi bahan dokumentasi-dokumntasi untuk Japan Platform dan KPKP-ST sebagai acuan dalam evaluasi akhir yang pengembangan partisipasi anggota kelompok ibu-ibu penyintas kemiskinan.

B. Transofmasi mayarakat dalam pelaksaan proyek Assisting Economic Empowerment

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Japan Platform dan KPKP-ST dalam proyek Assisting Economic Empowerment telah memberikan pengaruh atau dampak yang cukup efektif. Pengaruh-pengaruh tersebut meliputi wawasan, cara berfikir serta sistem dalam masyarakat.

Menurut Rizky Sultan selaku Humas KPKP-ST tujuan utama yang ingin dicapai dalam proyek Assisting Economic Empowerment ini yaitu membentuk individu dan masyarakat yang mandiri dan mampu cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi saat dan pasca bencana terjadi. Japan Platform dan KPKP-ST dalam proyek pemulihan ekonomi ini membentuk kelompok usaha kecil rumahan dan produksi usaha yang di mobilisasi oleh ibu-ibu penyintas kemiskinan sehingga menciptakan perempuan yang mandiri serta di harapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga.

Program pemulihan ekonomi pasca bencana yang dilaksanakan oleh Japan Platform dan KPKP-ST telah diaplikasikan dalam sebuah kegiatan produksi yang dilakukan secara kelompok oleh ibu-ibu penyintas kemiskinan di Sigi Sulawesi Tengah dengan mengelolah hasil pertanian menjadi olahan bumbu dapur dan makanan ringan. Anggota kelompok penyintas kemiskinan yang semula bekerja sebagai buruh tani dan ibu rumah tangga sekarang bisa menjadi pelaku usaha sektor industri rumahan. Hasil pelatihan yang telah di produksi oleh ibu-ibu penyintas kemiskinan di Sigi dapat dilihat sebagai berikut:

a. Kecap manis dan dodol kelapa



b. Anyaman bambu



c. Kearjinan Bunga dari plastik



d. Minyak goreng kelapa dan keripik singkong



e. Kopi Lindu



Proyek pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Japan Platform dan KPKP-ST telah memberikan dampak langsung dan manfaat khususnya untuk ibu-ibu penyintas kemiskinan di Kabupaten Sigi pasca bencana yang terjadi tahun 2018 dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, sosial dan ekonomi yang mana anggota kelompok

penyintas kemiskinan saat ini sudah mempunyai banyak pengetahuan baru terutama di bidang pengolahan hasil pertanian terlihat dari meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai inovasi dalam pengolahan produk hasil pertanian yang di mobilisasi oleh Perempuan di Kecamatan Sigi yang bermata pencaharian sebagai buruh tani, buruh serabutan dan ibu rumah tangga. Semangat tersebut dibuktikan dengan peran serta ibu-ibu penyintas kemiskinan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Japan Platform dan KPKP-ST., sedangkan pada aspek ekonomi, yaitu ditandai dengan meningkatnya pendapatan bagi ibu-ibu penyintas kemiskinan yang telah mengikuti kegiatan dalam proyek Assisting Economic Empowerment yang di selenggarakan oleh Japan Platform sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Peningkatan pendapatan tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

**Tabel wawancara sebelum proyek Assisting Economic Empowerment
dilaksanakan (sebelum bencana)**

NO	NAMA	PEKERJAAN UTAMA	PENDAPATAN SEMULA PERHARI	PENDAPATAN TAMBAHAN PERBULAN
1	Sunarti	Ibu Rumah Tangga	-	-
2	Beang	Ibu Rumah Tangga	-	-

3	Masri	Buruh tani	15.000	300.000 (tidak menentu)
4	Alang	Buruh tani	20.000	150.000 (tidak menentu)
5	sugi	Buruh Serabutan	10.000-20.000	-
6	Nuri	Buruh cuci	-	250.000 (perbulan)

Sumber: data Primer KPKP-ST

**Tabel wawancara pada saat proyek Assisting Economic Empowerment
dilaksanakan (Pasca bencana)**

NO	NAMA	PEKERJAAN UTAMA	PENDAPATAN SEMULA PERHARI	PENDAPATAN TAMBAHAN PERHARI
1	Sunarti	Ibu Rumah Tangga	-	25.000
2	Beang	Ibu Rumah Tangga	-	30.000
3	Masri	Buruh tani	-	15.000-25.000
4	Alang	Buruh tani	-	35.000

5	sugi	Buruh Serabutan	-	35.000
6	Nuri	Buruh cuci	-	25.000

Sumber: data Primer KPKP-ST

Berdasarkan hasil laporan mingguan yang diterima dari ibu Lili selaku ketua dari kelompok ibu-ibu penyintas kemiskinan di Sigi serta hasil wawancara dari beberapa anggota kelompok dari rumah industri di atas membuktikan bahwa adanya peningkatan penghasilan dari yang semula berprofesi sebagai buruh tani, buruh cuci, buruh serabutan maupun ibu rumah tangga dengan adanya proyek Assisting Economic Empowerment pendapatan mereka dapat meningkat.

Meningkatnya pendapatan keluarga pada anggota penyintas kemiskinan juga memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan dalam setiap program yang dilaksanakan oleh Japan Platform dan KPKP-ST.

C. Analisis Dampak kerjasama JPF dan KPKP-ST terhadap masyarakat

Berdasarkan penilaian efektivitas kerjasama yang dilaksanakan oleh Japan Platform (JPF) dan Kelompok kesetaraan perjuangan perempuan (KPKP-ST), kerjasama yang dilakukan oleh kedua NGO ini dirasa cukup efektif meskipun secara keseluruhan anggota UKM yang berada di Kabupaten Sigi belum merasakan dampak yang signifikan dari proyek kerjasama yang dilakukan JPF dan KPKP-ST ini, Namun

secara langsung dampak dari keterlibatan JPF dan KPKPS-ST terhadap masyarakat pasca bencana dapat dinilai dari dampak sosial, dampak ekonomi, serta dampak kemasyarakatan.

- a. Dampak sosial dari keterlibatan JPF dan KPKP-ST dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana yaitu berupa peningkatan pengetahuan dan wawasan yang diberikan oleh Japan Platform melalui pemberdayaan pendidikan tentang pengetahuan dampak bencana terhadap kemiskinan masyarakat yang berpotensi menimbulkan masalah baru seperti kelaparan, tingginya tingkat pernikahan dini serta besarnya potensi kekerasan yang dapat dilakukan oleh orang terdekat dalam keluarga. Peningkatan pengetahuan dan wawasan yang diberikan oleh Japan Platform secara langsung yaitu pemberian pelatihan, penyuluhan, serta sosialisasi serta membentuk kelompok dan mengadakan pertemuan rutin antar pihak JPF, KPKP-ST dan masyarakat yang tergabung dalam proyek kerjasama tersebut. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh JPF dan KPKP-ST dalam proyek ini dapat membantu para penyintas kemiskinan pasca bencana untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pasca bencana.
- b. Dampak ekonomi dari keterlibatan JPF dan KPKP-ST dalam pemulihan ekonomi melalui proyek Assisting Economic Empowerment yaitu kemampuan para penyintas kemiskinan dalam meningkatkan harga jual produk mereka. Dari peningkatan harga jual produk tersebut, secara langsung juga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam proyek

tersebut, yang secara tidak langsung dapat memberikan semangat tersendiri kepada para penyintas kemiskinan dalam memproduksi produk olahan mereka. Selain peningkatan harga jual produk, JPF dan KPKP-ST juga menekankan pada peningkatan kualitas produk.

- c. Dampak terhadap masyarakat dari kerjasama proyek yang dilaksanakan oleh JPF dan KPKP-ST yaitu melalui Interaksi di dalam kelompok yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan para penyintas kemiskinan yang mana sebagian besar dari mereka masih berpendidikan rendah sehingga dibuat suatu kelompok UKM. Pembentukan kelompok tersebut bertujuan agar mereka dapat saling berinteraksi dan berbagi pengalaman. Di mana keterlibatan aktif para penyintas dalam kelompok pada saat mengadakan pertemuan memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan UKM dan produksi. Pertemuan yang dilakukan antara JPF, KPKP-ST dan sesama anggota kelompok UKM juga bertujuan untuk membuat suatu rumusan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam kelompok UKM tersebut. Oleh karena itu, mereka yang terlibat dalam proyek Assisting Economic Empowerment dituntut untuk dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan. Dari kesediaan anggota untuk dapat berperan aktif dalam forum pertemuan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan produksi, harga jual serta keberlangsungan UKM tersebut.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam proyek Assisting Economic Empowerment di Sigi Sulawesi Tengah

Dalam pelaksanaan proyek Assisting Economic Empowerment untuk meningkatkan ekonomi melalui UKM yang di mobilisasi oleh ibu-ibu penyintas kemiskinan pasca bencana di Sulawesi Tengah yang ada di Kabupaten Sigi, tentu saja ada faktor pendukung maupun faktor penghambatnya dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi di Kabupaten Sigi yaitu meliputi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal yaitu para ibu-ibu penyintas kemiskinan yang memiliki tujuan yang sama yaitu keinginan untuk terus belajar dan terus berusaha untuk memberdayakan diri sehingga menjadi modal utama dalam tercapainya sebuah tujuan dalam proyek pemulihan ekonomi dan menciptakan pribadi yang mandiri serta tidak tergantung dengan pihak lain.
2. Faktor eksternal yaitu adanya berbagai dukungan, baik dari pemerintah setempat, keluarga, masyarakat dan potensi sumber daya alam yang tersedia, yang ikut mempengaruhi keberhasilan berjalannya proyek pemulihan ekonomi ini.

BAB V

KESIMPULAN

Secara garis besar, penelitian ini ingin membahas mengenai peran Non Governmental Organization (NGO) dalam pemulihan ekonomi Masyarakat Sigi pasca bencana di Sulawesi Tengah. Dalam hal ini, Japan Platform merupakan salah satu Non Governmental Organization yang melakukan aksi penyaluran bantuan sosial dan kemanusiaan.

Japan Platform yang awal terbentuknya merupakan sebuah komunitas konsorsium yang lebih fokus memperjuangkan pendidikan anak-anak yang terjadi setelah konflik kosovo berkembang menjadi Non Governmental Organization yang membantu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2000 yang tidak sepenuhnya terbantu oleh Pemerintah Jepang. Kemudian Japan Platform sebagai Non Governmental Organization mulai membantu masyarakat dunia yang terdampak krisis kemiskinan baik itu di sebabkan oleh konflik maupun bencana alam.

Sebagai Non Governmental Organization, Japan Platform di Sigi memberikan bantuan cepat tanggap pasca bencana, selain itu Japan Platform juga membentuk program Assisting Women's Economic Empowerment for Earthquake and Tsunami Recovery in Central Sulawesi dengan organisasi lokal yaitu KPKP-ST untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan akibat bencana serta berupaya menekan masalah yang akan timbul akibat lumpuhnya ekonomi pasca bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amri, Mohammad,. dkk. 2015 RBI: Risiko Bencana Indonesia, Jakarta: BNPB Press.
- Bennett, Jon., et. al. 2006. Coordination of International Humanitarian Assistance in Tsunami affected Countries. London: Tsunami Evaluation Coalition (TEC).
- Didi Krisna. 1993. Kamus Politik Internasional, Jakarta : Grasindo, hal. 18
- Finnemore, M & Sikkink, K 1998. Internasional Norm Dynamic and Political Change, Internasional Orgsnization Journal, 52, (4), 887-917
- Martha Finnemore & Kathryn Sikkink “ Internasional Norm Dynamic and Political Change dalam Internasional Organization Journal Vol 52 (4), 1998, hal 887-917
- Lewis, D., & Kanzi, N. (2009). Non-Governmental Organization and Development. London and Newyork: Routledge.
- Mas'oed, M. (1990). Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3S.

Internet

BBC News Indonesia, 2018, gempa, tsunami dan likuifaksi palu, di akses pada 17 November 2019. Dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45832237>

BBC News Indonesia, 2019, pernikahan anak di kamp pengungsian palu, di akses pada 19 November 2019. Dari <https://www.bbc.com/indonesia/media-49069492>

Benson and Twigg, 2007, Understandings in disaster risk reduction and resilience, di akses pada 1 desember 2019. Dari <https://www.circleindonesia.or.id/>.

BNPB, 2018, kerugian dan kerusakan dampak bencana di sulawesi tengah, di akses pada 18 November 2019. Dari <https://www.bnpb.go.id/kerugian-dan-kerusakan-dampak-bencana-di-sulawesi-tengah-mencapai-1382-trilyun-rupiah>

Disaster Risk Management, diakses pada 18 November 2019. Dari <http://www.iora.int/en/priorities-focus-areas/disaster-risk-management>.

Emergency humanitarian aid organization, Nb , NGO Japan Platform , diakses pada 18 November 2019 dari <https://www.japanplatform.org/E/about/jpf.html>

GSDRC. Humanitarian Principles and Humanitarian Assistance, diakses pada 18 November 2019 dari <http://www.gsdr.org/topic-guides/international-legal-frameworks-for-humanitarian>

ICRC. Indonesia: The Humanitarian Response Since the Tsunami, diakses pada 18 November 2019

dari <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/indonesia->

Lewis, D. (2003). Theorizing the Organization and Management of NonGovernmental Development Organizations. Public Management Review Vol.5 issue 3, 325-344. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1080/147190303200014693>

Literasi publik , 2018 , pedoman umum mitigasi bencana di indonesia , di akses pada 18 November 2019 dari <https://www.literasipublik.com/wilayah-indonesia-rawan-bencana>

Media alkhairat online, 2019, KPKPST komitmen bangkitkan ekonomi perempuan pasca bencana, di akses pada 19 November 2019, <https://media.alkhairaat.id/kpkpst-komitmen-bangkitkan-ekonomi-perempuan-korban-bencana/>

UNHCR, Emergency Response to Tsunami- And Earthquake-Affected Areas, di akses pada 19 November 2019 www.unhcr.org/4666d26811.pdf,

Jurnal

Alexander Wendt, Anarchy Is What State Make Of It: The Social Construction Of Power Politic “ Dalam Internasional Organozation Journal Vol 46 (2), 1992
Hal 391-425

Ahmed, S., & Potter, D. M. (2006). NGOs in International Politics. Boulder, USA: Kumarian Press.

Lewis, D., & Kanzi, N. (2009). Non-Governmental Organization and Development. London and Newyork: Routledge.

Mirza, Teuku. Efektivitas Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Bencana Pasca Tsunami di BandaAceh, Vol.12, No.1, 200.

Wawancara

KPKP-ST, data wawancara masyarakat terdampak bencana Palu, Sigi, Donggala